

## BAB VI

# Menyibak Dinamika Politik Islam di Kota Cirebon

Usman Manor

---

## A. Pendahuluan

Politik dan agama merupakan dua hal yang mewarnai perkembangan masyarakat pada suatu wilayah dari masa ke masa. Adanya politik dan agama membuat masyarakat memiliki karakteristik masing-masing yang sejalan dengan dinamika perkembangan yang terjadi pada masyarakat. Dalam lintasan sejarah Indonesia, khususnya di wilayah kota pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan, politik dan agama menjadi unsur kental yang membedakan ide, gagasan, dan cara pandang masyarakat (dalam hal ini masyarakat sipil) mengenai harapan dan kondisi ideal di masa mendatang meskipun konsepsi tentang politik dan agama tersebut melahirkan pasang surut dan membuat kegemilangan hingga kemunduran.

---

U. Manor

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *e-mail*: manorusman@gmail.com

© 2024 Editor & Penulis

Manor, U. (2024). Menyibak dinamika politik Islam di Kota Cirebon. Dalam E. Turmudi (Ed.), *Masyarakat Sipil Islam dalam Kehidupan Demokrasi Indonesia* (213–239). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.753.c933  
E-ISBN: 978-623-8372-64-5

Mengacu pada opini tersebut, dinamika politik Islam di Kota Cirebon menarik untuk dikaji, mengingat Kota Cirebon merupakan salah satu kota perdagangan di Nusantara pada masa lalu yang diatur oleh sistem pemerintahan berupa kerajaan bercorak Islam dengan pergolakan politik di dalamnya. Wilayah di sekitar Kota Cirebon, seperti Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan akan menjadi pembanding terhadap dinamika politik yang terjadi di Kota Cirebon. Selain itu, sebagai bingkai dalam dinamika politik Islam yang menyangkut studi sosiologi, metode dan peristiwa sejarah yang melatarbelakangi dinamika tersebut terutama sejarah mengenai keraton dan pesantren akan menjadi alat bantu dalam menyibak dinamika yang terjadi.

Secara umum, tulisan ini berpijak pada konsep *Civil Islam*, demokrasi, dan dinamika demokrasi yang dikemukakan oleh Hefner (2000; 2009), Hefner dan Muhammad Qasim Zaman (2007), Tocqueville (1956), dan Ramage (2002). Konsep masyarakat sipil (*civil society*) merupakan konsep tentang masyarakat yang mandiri atau otonom, yaitu sebagai entitas yang mampu memajukan diri sendiri, dapat membatasi intervensi pemerintahan dan negara dalam realitas yang diciptakannya, serta senantiasa memperlihatkan sikap kritis dalam kehidupan politik. Secara operasional, masyarakat sipil yang dimaksud mencakup institusi-institusi nonpemerintah yang berada di masyarakat yang mewujudkan diri melalui organisasi, perkumpulan atau pengelompokan sosial dan politik yang berusaha untuk membangun kemandirian, seperti organisasi sosial dan keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), paguyuban, kelompok-kelompok kepentingan, dan sebagainya yang juga bisa mengambil jarak dan menunjukkan otonomi terhadap negara.

Cohen dan Arato (1992) mendefinisikan masyarakat sipil sebagai wilayah interaksi sosial yang di dalamnya mencakup semua kelompok sosial paling akrab (khususnya keluarga), asosiasi (terutama yang bersifat sukarela), gerakan kemasyarakatan, dan berbagai wadah komunikasi publik lainnya yang diciptakan melalui bentuk-bentuk pengaturan dan mobilisasi diri secara independen, baik dalam hal

kelembagaan maupun kegiatan. Perspektif lain dikemukakan oleh Gramsci (1971) yang mendefinisikan masyarakat sipil sebagai kumpulan organisme privat, berbeda dengan negara yang disebutnya masyarakat politik (*political society*). Sementara itu, Larry Diamond (1994) mengatakan bahwa masyarakat sipil memberikan kontribusi yang cukup besar bagi tumbuhnya demokrasi. *Pertama*, masyarakat sipil menyediakan wahana sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan, dan moral untuk menjaga dan mengawasi keseimbangan negara. *Kedua*, keberagaman dalam masyarakat sipil dapat menjadi dasar yang penting bagi persaingan yang demokratis. *Ketiga*, masyarakat sipil dapat memperkaya peranan partai-partai politik dalam hal partisipasi politik, meningkatkan efektivitas politik, dan meningkatkan kesadaran kewarganegaraan (*citizenship*). *Keempat*, masyarakat sipil ikut menjaga stabilitas negara. *Kelima*, masyarakat sipil sebagai wadah bagi seleksi dan lahirnya para pemimpin politik yang baru yang mampu menghalangi dominasi rezim otoriter.

Konsep tentang masyarakat sipil yang terbagi dalam lima fase diawali dari filsuf Yunani, Aristoteles, yang memandang masyarakat sipil sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Pada masa Aristoteles, masyarakat sipil dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan. Kemudian, pada fase kedua, tepatnya pada tahun 1767, Adam Ferguson mengembangkan wacana masyarakat sipil dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia. Berbeda dengan pendahulunya, Ferguson lebih menekankan visi etis pada masyarakat sipil dalam kehidupan sosial. Pemahamannya ini lahir tidak lepas dari pengaruh revolusi industri dan kapitalisme yang melahirkan ketimpangan sosial yang mencolok.

Selanjutnya pada fase ketiga, yaitu pada tahun 1792, Thomas Paine memaknai masyarakat sipil sebagai sesuatu yang berlawanan dengan lembaga negara yang dianggap sebagai antitesis negara. Menurut Paine, terdapat batas-batas wilayah otonom masyarakat sehingga negara tidak diperkenankan memasuki wilayah sipil atau dengan kata

lain masyarakat sipil merupakan ruang untuk dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas tanpa paksaan. Kemudian pada fase keempat, masyarakat sipil dikembangkan oleh G. W. F. Hegel, Karl Marx, dan Antonio Gramsci yang menafsirkan masyarakat sipil sebagai elemen ideologis kelas dominan. Pemahaman ini adalah reaksi atas pandangan Paine yang memisahkan masyarakat sipil dari negara. Hegel memandang masyarakat sipil sebagai kelompok yang subordinasi terhadap negara. Marx sendiri memandang masyarakat sipil sebagai masyarakat borjuis. Dalam konteks hubungan produksi kapitalis, keberadaan masyarakat sipil merupakan kendala terbesar bagi upaya pembebasan manusia dari penindasan kelas pemilik modal. Sementara pada fase terakhir atau fase kelima, masyarakat sipil dipandang oleh Alexis de Tocqueville sebagai kelompok penyeimbang kekuatan negara. Menurutnya, kekuatan politik dan masyarakat sipil merupakan kekuatan utama yang menjadikan demokrasi Amerika mempunyai daya tahan yang kuat.

Dalam beberapa hal, di masyarakat Indonesia terdapat embrio bagi lahir dan berkembangnya masyarakat sipil apabila dilihat dari tradisi-tradisi lokal yang terdapat di masyarakat itu sendiri, seperti tradisi di lembaga-lembaga pendidikan pesantren di seluruh Indonesia, tradisi kerja sama di masyarakat Bali yang disebut subak atau di masyarakat Jawa yang dikenal sebagai lumbung desa. Menurut Kuntowijoyo (2006), masyarakat sipil berwatak dinamis, dan kenyataan riil dalam sejarah, bukan masyarakat yang utopis. Mengenai fungsi dan peran masyarakat sipil pun cukup beragam, yang intinya memperkuat posisi masyarakat bila berhadapan dengan kepentingan negara, dan lebih tepatnya kepentingan penguasa.

Salah satu tujuan dari masyarakat sipil adalah adanya usaha yang sungguh-sungguh, terencana, dan sistematis untuk mewujudkan otonomi masyarakat sehingga mereka tidak bergantung kepada negara. Dalam konteks ini, masyarakat sipil dapat dilihat melalui bentuk-bentuk paguyuban yang mampu menciptakan solidaritas sosialnya sendiri. Dalam tataran tertentu, paguyuban ini merupakan ciri utama

dari kehadiran masyarakat yang baik. Hal ini dibuktikannya dengan adanya berbagai organisasi dalam masyarakat Indonesia, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan sebagainya. Masyarakat sipil memang memiliki pengertian yang beragam, seperti Hobbes yang melihat masyarakat sipil sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Sementara itu, Adam Ferguson melihat fungsi masyarakat sipil sebagai penjaga kohesi sosial dan penangkal dari ancaman negatif individualisme. Di sisi lain, Thomas Paine melihatnya sebagai antitesis negara yang dapat membatasi kekuasaan negara. Tocqueville, di satu pihak, melihat fungsi masyarakat sipil sebagai kekuatan penyeimbang negara.

Pada masyarakat sipil, unsur politik dan agama tidak dapat dipisahkan sehingga karakteristik masyarakat sipil sangat dipengaruhi oleh dua unsur tersebut. Dalam perjalanannya, kiprah politik Islam di panggung kekuasaan Indonesia banyak mengalami pasang surut. Masa awal Orde Baru sampai akhir tahun 1980 dapat dikatakan bahwa politik Islam di Indonesia banyak berada di luar arena kekuasaan. Namun, berkat perjuangan yang tidak pernah mengenal lelah sejak awal tahun 1990, hambatan terhadap politik Islam itu perlahan-lahan gugur dengan sendirinya. Politik Islam di Indonesia hampir mendekati ke arah cita-cita yang diharapkan, ditandai dengan kehadiran beberapa partai politik Islam di panggung politik. Pada dasarnya, negara (pemerintah) sangat menentukan perkembangan suatu agama di suatu negara tersebut. Kebijakan-kebijakan terhadap hal yang berbau keagamaan sangat memengaruhi terciptanya masyarakat madani (*civil society*) seperti yang menjadi cita-cita kedua belah pihak. Apabila kebijakan negara cenderung berpihak kepada salah satu agama tertentu, tak ayal jika negara atau keadaan negara tidak akan kondusif dan akan menimbulkan konflik yang mengarah ke unsur SARA.

Masyarakat sipil yang selanjutnya dikerucutkan menjadi *Civil Islam* menurut Hefner (2009) merujuk pada jenis atau varian keislaman yang memiliki karakteristik toleran, pluralis, sekuler, liberal, demokratis, inklusif, humanis, pro perubahan sosial, berprinsip pada kesetaraan gender, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban (*civil-*

ity). Konsep *Civil Islam* sangat beririsan dengan konsep masyarakat sipil yang mengedepankan kecenderungan untuk mengedepankan keterbukaan, solidaritas, dan keadilan. *Civil Islam* pada dasarnya mengandung premis bahwa masyarakat sipil mampu memelihara kebiasaan demokrasi yang setidaknya mengandung dua maksud, yaitu memiliki gerakan dan kapasitas untuk merumuskan wacana publik tentang *inklusifitas* sosial dan terdapat upaya membangun budaya pluralisme dan kesetaraan berbasis gerakan massa yang menuntut partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh sebab itu, konsep *Civil Islam* berusaha mendemonstrasikan kelembagaan dan hubungan sosiokultural, bukan hanya semata-mata mengedepankan gagasan Islam yang dianggap universal sehingga mampu untuk menopang demokrasi.

Konsep *Civil Islam* menjelaskan upaya untuk menyeimbangkan antara religiositas publik dan kebebasan individu dan pluralitas yang di dalamnya terdapat hak-hak minoritas. *Civil Islam* tidak mengacu pada kualitas yang secara historis sudah ada dengan nama moderasi atau toleransi, melainkan mengacu pada reformasi etika masyarakat muslim yang dipromosikan oleh pemikir, aktivis, dan organisasi di Indonesia. Gerakan reformasi etika ini berupaya menggabungkan nilai dan praktik Islam dengan demokrasi yang tidak memisahkan antara praktik berbangsa dan bernegara dengan praktik agama. Para pemikir, aktivis, dan organisasi berupaya memastikan proses demokrasi dilegitimasi oleh agama dan diperkuat oleh akulturasi budaya.

Terkait dengan reformasi etika publik ini, setidaknya terdapat tiga prinsip yang mendukung. *Pertama*, *Civil Islam* menolak dengan tegas gagasan demokrasi membutuhkan pembatasan kekuasaan, melainkan pemisahan kekuasaan antara pejabat negara dengan masyarakat religius untuk menghindari adanya kepentingan terselubung. *Kedua*, *Civil Islam* memberikan sanksi sosial tanpa pengecualian terhadap upaya mencampuri urusan terkait agama, negara, dan hak sipil, terutama pada hal-hal yang mendegradasikan nilai dan makna agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Ketiga*, *Civil Islam* tidak menekankan demokrasi sebagai hasil instrumen budaya barat yang identik

dengan liberal, melainkan demokrasi sebagai modernisasi dan instrumen peradaban untuk meminimalkan perbedaan sosial yang ada di dunia dengan berbagai macam latar belakang dan kepentingan.

Seperti yang telah dikemukakan di awal, Kota Cirebon sejak awal berdirinya menduduki peran sentral. Mula-mula Cirebon diposisikan sebagai pusat kerajaan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Cirebon berkedudukan sebagai Ibukota Keresidenan, Ibukota Kabupaten, sekaligus Ibukota Distrik. Bahkan tahun 1906 Cirebon dijadikan sebagai *Gemeente* atau Kota Praja (*Staatsblad*, 1906). Berpuluh tahun kemudian, wilayah ini secara administratif terbagi menjadi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan dengan luas wilayah 569 kilometer persegi di bagian timur dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Sebagai salah satu pusat budaya dan sastra pesisir serta pusat penyebaran Islam di Jawa Barat, Cirebon menyimpan banyak bukti sejarah, tidak hanya fisik, seperti masjid, keraton, makam, dan pesantren tua, juga bukti nonfisik seperti tradisi unik yang merupakan persenyawaan Jawa dengan Islam yang masih lestari hingga kini. Peninggalan bersejarah tersebut menjadi bukti adanya dinamika masyarakat sipil yang masif sehingga menarik dan layak untuk dikaji. Oleh sebab itu, penulis berupaya menyibak dinamika politik Islam di Kota Cirebon dengan bersumber pada hasil observasi dan wawancara terhadap beberapa tokoh masyarakat muslim di Cirebon terkait dengan konsepsi berpolitik.

## **B. Dinamika Masyarakat Sipil**

Di Indonesia, proses panjang demokrasi telah dilalui, yang ditandai dengan reformasi yang berimbas pada seluruh sektor kehidupan. Pada bidang pemerintahan, munculnya desentralisasi administratif yang paling luas jangkauannya mampu melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat ke provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian, legislator juga membuat amandemen konstitusi yang dirancang salah satunya untuk menegakkan kebebasan beragama. Di samping itu, kaum reformis juga memberlakukan kebijakan yang dirancang

untuk mengakhiri peran angkatan bersenjata dalam politik nasional, memisahkan polisi dari militer, dan memutuskan hubungan antara militer dengan Partai Golkar yang telah berkuasa lama. Dalam hal ini, terdapat indikasi bahwa konsensus intrasipil yang juga dimotori oleh pemikir, aktivis, dan organisasi Islam mengenai isu fundamental dalam berbangsa dan bernegara mampu untuk mengubah arah negara. Hal tersebut terjadi karena para pemikir, aktivis, dan organisasi Islam di Indonesia melihat fenomena yang terjadi di negara-negara Timur Tengah dan Afrika dengan adanya penerapan hukum Islam, bahkan mengislamkan perbankan melalui bank syariah.

Proses panjang demokrasi dan dinamika masyarakat Muslim di Indonesia pasca reformasi beberapa kali mengalami perdebatan dan pertentangan. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang didominasi muslim pernah menolak upaya untuk mengubah konstitusi negara. Hal tersebut terjadi justru dengan dorongan dari organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. Selain itu, penolakan tersebut mencerminkan kecenderungan masyarakat muslim di Indonesia bersikap skeptis terhadap upaya untuk mendirikan negara Islam. Kehadiran lembaga semacam NU, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mampu untuk menjadi corong untuk menyuarakan aspirasi demokrasi yang formal dengan berlandaskan pluralisme Pancasila dengan terus mendukung kebebasan beragama dan melindungi hak-hak minoritas. Dengan begitu, demokrasi di Indonesia mulai memperlihatkan adanya keterlibatan dan kesetaraan yang membentuk nilai politik dan etika publik. Namun demikian, perbedaan mendasar antara Indonesia dengan negara mayoritas muslim di dunia adalah kualitas dalam beragama dan kuantitas masyarakat muslim tidak berbanding lurus dengan dukungan politik terhadap partai politik yang mempromosikan pembentukan negara yang Islamis. Anomali terjadi saat pilkada tahun 2017 yang berupaya untuk memberikan dukungan politik kepada selain Ahok, sekaligus mendeskripsikan bahwa kehadiran masyarakat Islam mampu memberikan warna dalam perpolitikan. Anomali tersebut berlanjut pada tahun 2019 yang berupaya untuk memberikan dukungan pada Joko Widodo yang pluralis dari salah satu organisasi Islam, yaitu NU.



Dinamika yang terjadi antara Islam dan demokrasi mendeskripsikan adanya pergeseran epistemologi yang berkaitan dengan Islam dan demokrasi di Indonesia. Konsep *Civil Islam* berupaya mengelaborasi antara praktik agama yang ditunjukkan melalui etika publik yang Islami dan modern dengan tetap memasukkan unsur demokrasi serta menolak upaya mengedepankan kebebasan individu. Kebangkitan Islam didukung oleh aspirasi populer yang kontekstual dengan perkembangan zaman dan selaras dengan negara, namun, tidak bertentangan dengan konsep pluralisme yang terdapat dalam Pancasila. Hal tersebut seperti pendapat yang disampaikan oleh Nurcholis Madjid dan dikutip oleh Hefner (2009), yaitu pada era modern, demokrasi dan hak warga negara adalah sesuatu hal yang penting bukan hanya untuk alasan negara, tetapi juga untuk perlindungan Islam dari penyalahgunaan nilai-nilai untuk keuntungan perorangan atau kelompok tertentu.

Ramage (2002) mengemukakan bahwa agama di Indonesia diposisikan pada tempat yang sangat strategis. Sekalipun disebutkan bahwa Indonesia bukan sebagai negara yang berdasarkan agama, pemerintah memberikan perhatian yang sedemikian luas dan besar terhadap kehidupan beragama. Sejak lahir, pemerintah negara ini menunjuk satu departemen tersendiri yang bertugas melakukan pembinaan dan pelayanan terhadap semua agama yang ada, yaitu Departemen Agama (kini Kementerian Agama). Meski demikian, negara dan agama merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan (*discourse*) yang terus berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam menerjemahkan agama sebagai bagian dari negara atau negara bagian dari dogma agama.

Ramage (2002) juga mengemukakan permasalahan legitimasi pemerintahan (khususnya pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Suharto), yaitu hubungan yang penting sekali antara negara dan Islam, peran dalam politik dan potensi demokrasi yang mendominasi dinamika perdebatan politik nasional. Politik di Indonesia menggambarkan sikap (dalam hal ini cendekiawan Islam) dan aspirasi yang dalam politik Indonesia untuk membentuk masa

depan yang menunjukkan bahwa negara telah sangat berhasil dalam mempertahankan lembaga-lembaga politik sekuler dalam masyarakat yang mayoritas muslim dengan bingkai ideologi nasional Pancasila.

Pada dasarnya, tanpa Pancasila negara akan bubar dengan sendirinya. Pancasila adalah seperangkat asas dan gagasan tentang negara yang harus dimiliki serta diperjuangkan sehingga Pancasila layaknya sebuah nyawa dari negara. Selain itu, akan terjadi disintegrasi masyarakat Indonesia jika terjadi upaya untuk mengganti Pancasila dengan suatu ideologi sektarian. Akan tetapi, jika pemerintahan bergaya militer berlangsung terus, masyarakat tidak akan terpecah menurut dimensi-dimensi teritorial, melainkan terjadi kehancuran jalinan masyarakat dan hilangnya mandat dari yang diperintah. Oleh karena itu, timbul gagasan untuk melawan penafsiran pemerintah yang menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi yang melingkupi semua dan mengatasi semua. Gagasan perlawanan ini dilakukan dengan mengembangkan pandangan alternatif tentang Pancasila, yang berpendapat bahwa visi Pancasila yang demikian hanya bisa dikembangkan di luar politik. Konsep besarnya adalah suatu pemerintahan yang adil, pemerintahan yang melindungi kebebasan mengeluarkan pendapat, berorganisasi, berserikat, juga pemerintahan yang menjamin kesamaan di hadapan hukum. Pancasila dahulu, sekarang, dan nanti adalah kompromi antara politik antara kaum demokrat, para pendukung negara teokratis, dan kaum nasionalis yang memungkinkan semua rakyat Indonesia untuk bergabung dalam suatu negara kesatuan yang nasionalis.

Selain peran signifikan Pancasila, organisasi masyarakat juga memiliki peran penting. Dalam hal ini, NU dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menjadi titik sentral peran penting tersebut. NU menganut konsep nasionalisme yang sesuai dengan Pancasila dan UUD tahun 1945 yang telah menjadi perintis dalam masalah-masalah ideologi. ICMI dianggap mampu mengembalikan Islam dan agama ke arena politik setelah dua dasawarsa dilakukan upaya-upaya untuk memisahkan agama dari politik.

Gagasan tentang relasi Islam dan negara selalu menjadi wacana aktual di Indonesia meskipun telah diperdebatkan dan mengalami *fluctuative discourse* dalam percaturan politik di Indonesia. Namun demikian, momen ketegangan dan perdebatan mengenai negara dan Islam acap kali muncul menjelang pemilu karena momen ini merupakan kesempatan besar bagi semua golongan yang ingin memperjuangkan aspirasi politiknya, baik itu yang berideologikan nasionalis, maupun Islam. Sejak Pancasila dijadikan dasar ideologi formal Republik Indonesia pada tahun 1945 oleh Sukarno, Pancasila menjadi bagian perdebatan politik yang tak terelakkan oleh politikus dan agamawan, khususnya Islam.

Secara temporal, setidaknya ada beberapa dinamika relasi politik, negara, dan Islam. Sebelumnya pada tahun 1978–1985 telah terjadi internalisasi ideologi Pancasila yang diinstruksikan oleh Presiden Suharto, dan kemudian menimbulkan perdebatan yang luar biasa di kalangan tokoh dan gerakan ideologi Islam. Insiden politik semacam itu sempat terulang kembali pada tahun 1990 di negeri ini, yakni mengenai perdebatan ideologi. Sebenarnya, sumber perdebatan itu adalah relasi Islam dan negara. Penawar dari perdebatan tersebut adalah Pancasila, yang dirasa cocok untuk bangsa Indonesia tanpa memandang agama, etnisitas atau daerah. Nilai sosial terpenting Pancasila adalah toleransi. Meskipun Indonesia secara filosofis didasarkan pada agama, negara tidak mendukung salah satu agama.

Agama tampaknya yang paling sering menjadi alat politik untuk membenarkan kelompok sendiri, serta menyalahkan kelompok lainnya. Padahal, setiap orang beragama umumnya sepakat bahwa pesan inti agama adalah memelihara kehidupan damai serta saling mengasihi antarsesama manusia. Apabila yang terjadi adalah sebaliknya dari pesan-pesan pokok setiap agama, tentulah telah terjadi kesalahpahaman antarpemeluk agama. Untuk itulah, ide toleransi dalam bingkai pluralisme agama ini penting dalam rangka menciptakan persatuan dan kesatuan antarsesama bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan.

Toleransi ditandai dengan adanya kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dengan yang lain saling *take and give* (menerima dan memberi). Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia mempunyai nilai-nilai penting dalam menciptakan keharmonisan sesama masyarakat dan meraih kestabilan politik di Indonesia. Ide ini dapat dilirik dalam istilah *pribumisasi* Islam, nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, prinsip humanis dalam pluralitas masyarakat, dan prinsip keadilan serta prinsip egaliter. Dengan kata lain, Islam sebagai panduan dan tuntunan bernegara (sebagai visi dan misi), demokrasi sebagai alat untuk mencapai tujuan bernegara (sebagai strategi), dan toleransi merupakan implementasi dari penerapan Islam dan demokrasi.

Dinamika politik Islam di Indonesia yang mengalami persinggungan dengan demokrasi dan melahirkan toleransi secara umum juga memengaruhi perkembangan politik Islam di Kota Cirebon. Sejarah mencatat bahwa Cirebon sebagai salah satu kota simpul tengah yang menghubungkan beberapa kota besar di Pulau Jawa yang menjadi bagian penting dari proses panjang sejarah Islam di Indonesia (Firmanto, 2015). Terkenal dengan julukan “Kota Udang”, Cirebon dalam sejarah kuno dikenal sebagai daerah yang terletak di sebelah timur laut Provinsi Jawa Barat. Pada saat ini, yang disebut daerah Cirebon merupakan wilayah bekas Keresidenan Cirebon yang terdiri dari Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan.

Mengemukakan politik tidak lengkap apabila tidak menyertakan pendidikan yang menjadi penyokong bagi politik sehingga bersifat dinamis dan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan tersebut yang berusaha dipetakan oleh Hefner (2007) dalam konteks tren baru pendidikan Islam yang memicu munculnya keragaman pertumbuhan politik pendidikan Islam pada masa kontemporer di Asia Tenggara. Secara spesifik, Hefner mengklasifikasikan negara menjadi dua, yaitu negara yang mayoritas berpenduduk muslim, seperti Indonesia, dengan persentase penduduk muslim sekitar 87,8% dan di Malaysia dengan persentase

penduduk muslim sebesar 60%, dan negara yang berpenduduk minoritas muslim, seperti di Thailand, Filipina, dan Kamboja.

Hefner (2007) mengklasifikasikan tipologi lembaga pendidikan Islam yang terdiri dari tiga bentuk, yaitu pengajian Al-Qur'an yang dikhususkan untuk membaca dan menghafal Al-Qur'an, pondok pesantren sebagai lembaga untuk mengkaji dan mendalami paham keislaman, dan madrasah sebagai sekolah modern yang sudah dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang lengkap. Pondok pesantren di Indonesia merupakan lambang keberhasilan pendidikan Islam dalam mempertahankan sistem pendidikannya. Namun, sekitar tahun 1910-an, pesantren mulai mengalami perubahan dengan mengadopsi sistem pendidikan sekolah. Dalam perkembangannya di Indonesia, sekolah Islam sejak tahun 1900-an memiliki kesamaan dengan dengan teori politik gerakan sosial yang tidak hanya mendidik siswa, tetapi juga membentuk jaringan ideologi sosial, yang kelak akan berpengaruh terhadap transformasi sosial, bahkan transformasi negara.

Di Indonesia, gerakan sosial pada sekolah binaan PKS dan Hidayatullah memiliki pengaruh terhadap kurikulum ajaran masing-masing lembaga. Pengaruh tersebut tidak hanya pada sisi ideologis tetapi juga pada tataran politik, di mana sekolah menjadi objek untuk mengembangkan perannya sebagai gerakan sosial yang kelak akan menghasilkan generasi yang berkembang sesuai dengan ideologi. Upaya lain yang berkembang khususnya dalam sekolah Islam adalah munculnya sekolah Islam terpadu dari berbagai jenjang, mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah. Selain itu, terdapat pula madrasah *salafi* yang memiliki corak wahabi, dipelopori oleh *salafi* wahabi dari Timur Tengah yang memiliki kurikulum khas tersendiri. Perkembangan sekolah Islam tersebut makin memperkuat konsep bahwa dari sisi ideologis Asia Tenggara memiliki hubungan erat dengan Timur Tengah. Semenjak tahun 1990, masih ada beberapa sekolah yang masih menerapkan sistem tradisional dan jauh dari perkembangan serta campur tangan politik. Hanya sedikit dari mereka yang mengikuti contoh dari figur Abu Bakar Ba'asyir yang berambisi untuk merevolusi negara dan masyarakat.

Generasi sekolah Islam yang berkembang, bahkan kebanyakan lebih mengajarkan tentang upaya membangun negara dan masyarakat yang damai. Islam dan nasionalisme pada awal abad ke-21 ini masih memiliki gerakan yang menyatakan bahwa nasionalisme bertentangan dengan Islam, seperti halnya yang digaungkan oleh Persatuan Islam (PERSIS). Walaupun sekolah yang dibina tidak mengajarkan kekerasan, kebanyakan mengajarkan bahwa nasionalisme tidaklah tepat untuk dijadikan dasar negara. Paham ini kemudian dikembangkan dengan munculnya partai politik Islam Hizbut Tahrir yang awalnya dimulai dari sejarah munculnya Darul Islam (DI) yang berpegang teguh ingin membangun negara Islam di Indonesia.

Melalui fenomena gerakan sosial ini, menurut Hefner, para pendidik muslim dihadapkan pada beragam pertanyaan yang berhubungan demokrasi, pluralisme, nonmuslim, dan permasalahan perempuan. Perasaan dilema pun muncul, antara mempertahankan semangat nasionalisme cinta tanah air dengan menegakkan syariat Islam lalu mendirikan negara Islam. Hefner (2007) mengemukakan pula bahwa konsep demokrasi merupakan landasan terbaik untuk negara dan negara harus didasarkan pada Al-Qur'an dan sunah serta menerapkan syariat hukum Islam. Namun, jika dihubungkan dengan negara Islam, hanya kurang dari 30% warga negara yang mendukung partai politik Islam.

Menurut Hefner (2007), hal ini menyiratkan bahwa masyarakat Islam Indonesia memang meyakini bahwa syariat Islam merupakan petunjuk dari Tuhan yang perlu ditegakkan, namun jika dihubungkan dengan golongan radikal dan penerapan hukum Islam secara keseluruhan, masih banyak di antara mereka yang memilih menggunakan politik hukum demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini, proses tersebut dinamakan Hefner sebagai *Etazitation of Islamic Education* atau penegeraan pendidikan Islam. Selain itu, perspektif perbandingan dan pembaruan pendidikan Islam dianggap paling reformis dan progresif di dunia Islam. Kenyataan ini, seperti kesimpulan Hefner, merupakan hasil dari kolaborasi paling efektif di antara para pengelola pendidikan dan pendidik muslim yang memiliki independensi dengan

para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab mengawasi pendidikan Islam. Ketika pendidikan Islam berhadapan dengan berbagai tantangan modern dan tatkala kaum muslimin sendiri berada dalam kesulitan, peran pemerintah dalam reformasi pendidikan seolah menjadi keniscayaan. Dalam istilah lain, proses tersebut bisa juga disebut sebagai reformasi yang disponsori pemerintah (*state-sponsored reform*).

Mengerucut secara spasial pada wilayah Kota Cirebon, hasil penelitian Hefner mengenai masyarakat sipil Islam di Asia Tenggara dan di Indonesia sangat sesuai dengan kondisi terkini masyarakat sipil Islam di Kota Cirebon yang secara budaya dan latar belakang sejarah telah terbentuk sebagai kota pelabuhan modern pada masa lalu. Kota Cirebon merupakan bagian dari Kesultanan Cirebon yang berdiri sejak 1479 oleh Syarif Hidayatullah, seorang ulama, wali, sekaligus keturunan bangsawan sehingga corak keagamaan dan legitimasi kekuasaan sangat kuat melekat pada Cirebon (Erwantoro, 2012). Pada masa Syarif Hidayatullah tersebut Cirebon mengalami masa kejayaan, dalam perkembangan penyebaran paham Islam, perkembangan perekonomian, dan kestabilan pemerintahan.

Konsep demokrasi yang memberikan kebebasan dan kesetaraan telah diterapkan di bawah kekuasaan Syarif Hidayatullah meskipun demokrasi sendiri belum dikenal pada masa itu. Konsep kebebasan dan kesetaraan ini yang membuat Cirebon mampu merdeka dari Kerajaan Sunda dan mampu mengislamkan penduduk pada wilayah kerajaan dengan sistem pengislaman *top-down*, yaitu dari pejabat atau petinggi kerajaan hingga kepada masyarakat pada lingkup terkecil. Kedua konsep itu juga lah yang membuat Cirebon mampu melaksanakan pembangunan infra- dan suprastruktur, serta mampu menjalin hubungan antarkerajaan dengan baik (Erwantoro, 2012). Kemajuan secara agama, ekonomi, dan politik pada Kerajaan Cirebon membawa kesejahteraan pada masyarakat yang turut mengontrol awal munculnya kelas menengah elite yang berperan dalam lintasan sejarah di Kota Cirebon. Jika pada masa Kerajaan Cirebon di bawah kepemimpinan Syarif Hidayatullah kelas menengah berperan dalam

menjalankan roda pemerintahan dan teknis penyebaran agama Islam, pada masa pendudukan *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) dan Pemerintahan Hindia Belanda kelas menengah sangat berperan dalam memobilisasi masyarakat untuk menentang penjajahan dan mengadakan pembaruan melalui pendidikan pesantren. Peranan kelas menengah tersebut terus terasa hingga saat ini sehingga tak jarang perubahan kultur yang terjadi pada masyarakat Kota Cirebon ditunjang oleh pengaruh kelas menengah.

Perubahan kultur pada masyarakat juga memengaruhi kelas menengah di Cirebon. Terkait dengan kelas menengah ini, penulis mendukung hasil penelitian Hefner yang menggunakan analisis dari Kuntowijoyo (2006). Kultur Islam menyentuh masyarakat yang terdidik dan tercerahkan melalui pendidikan pesantren dengan adanya kesenjangan antara merasuknya kultur Barat pada masyarakat perkotaan ketika masa pendudukan VOC hingga Pemerintahan Hindia Belanda dan kebiasaan atau etiket atau nilai-nilai moral tradisional (Jawa) yang tidak bisa lagi mengikat. Dengan adanya kesenjangan tersebut, agama Islam tampil sebagai modernisme dan neomodernisme yang sangat multietnis. Pola tersebut yang telah dihadirkan oleh Syarif Hidayatullah dengan menjadikan Islam sebagai landasan dalam menyelesaikan kesenjangan yang terdapat di masyarakat kala itu.

Kehadiran kelas menengah yang merupakan bagian dari masyarakat sipil Islam di Cirebon pada masa kini diharapkan mampu untuk mendukung ideologi dan kebijakan pemerintah sehingga hierarki elite birokrasi pemerintah perlahan mulai luntur. Senada dengan Hefner, Nakamura juga berpendapat bahwa semakin meluasnya lapisan terdidik di kalangan umat Islam, mobilitas vertikal juga semakin terbuka sehingga di antara mereka kemudian banyak yang menjadi profesional dan birokrat. Hal tersebut secara simultan juga memengaruhi perkembangan pendidikan Islam yang juga berdampak pada perkembangan politik di Kota Cirebon. Kehadiran pendidikan dasar, pesantren, hingga perguruan tinggi Islam di Kota Cirebon memicu semangat perubahan dalam tatanan pemerintahan dan perekonomian meskipun masih belum signifikan.



### C. Kota Cirebon dalam Persinggungan Agama dan Politik

Cirebon berasal dari kata 'ci' atau '*cai*' dan 'rebon' dari gabungan bahasa Sunda dan bahasa Jawa. 'Ci' berarti air sisa olahan udang yang dapat diolah menjadi terasi, sementara 'rebon' merupakan udang kecil (Hariyanto, 2016). Mengacu pada bahasa yang digunakan dalam menyusun kata 'Cirebon', pada perkembangannya Cirebon menjadi daerah persinggungan sekaligus perbatasan antara budaya Jawa dan budaya Sunda. Sementara itu, mengacu pada arti kata 'Cirebon' tersebut, pada perkembangannya Cirebon berkembang menjadi wilayah penghasil ikan dan udang. Tak pelak hal ini membuat Cirebon menjadi daya tarik bagi wilayah lain sehingga Cirebon berkembang menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan transit bagi pedagang Nusantara dan juga pedagang asing, seperti pedagang Tiongkok, India, Arab, Persia, Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda.

Persinggungan melalui interaksi masyarakat Cirebon yang merupakan campuran suku Jawa dan suku Sunda dengan masyarakat asing menyebabkan munculnya akulturasi budaya pada masyarakat Cirebon, sekaligus menjadikan masyarakat Cirebon kental akan unsur heterogenitas. Unsur Hindu-Buddha yang melekat bergabung dengan unsur Islam dan unsur asing lainnya. Akulturasi budaya tersebut terlihat dari tradisi ritual Panjang Jimat yang di dalamnya terdapat tradisi *caos* (silaturahmi) dan *matur bakti* (persembahan) kepada Sultan dan keluarganya sebagai puncak acara memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW (Hariyanto, 2016).

Selain pengertian Cirebon sebagai wilayah penghasil udang, secara etimologi Cirebon berasal dari kata 'caruban' yang berubah menjadi 'carbon', atau 'cerbon', dan akhirnya menjadi Cirebon. Kata tersebut mengandung arti campuran yang kemudian dikaitkan dengan wilayah tempat bercampurnya penduduk dari berbagai bahasa, bangsa, agama, aksara, dan pekerjaan (Jamil, 2013). Awalnya, Cirebon dikenal dengan sebutan Tegal Alang-Alang atau Kebon Pesisir, kemudian menjadi ibukota bagi kerajaan Islam pertama di Jawa bagian barat, yaitu Kerajaan Cirebon.

Kota Cirebon demikian pula halnya kota pelabuhan pada masa lalu memiliki beberapa tipologi khas yang terawat hingga saat ini. Tipologi khas tersebut mencerminkan adanya dinamika dan persinggungan unsur yang melekat pada masyarakat, seperti pemerintahan dan politik yang disimbolkan dengan bangunan peninggalan berupa keraton, sementara perekonomian disimbolkan dengan peninggalan berupa pelabuhan, kantor dagang, bangunan bekas perusahaan, bank, dan pasar. Selain itu, agama disimbolkan dengan peninggalan berupa masjid dan gereja. Di samping peninggalan-peninggalan tersebut, tipologi khas lainnya adalah adanya alun-alun sebagai tempat berkumpulnya masyarakat sekaligus tempat yang menghubungkan masyarakat dengan penguasa.

Di Cirebon terutama pada masa kerajaan hingga masa Pemerintahan Hindia Belanda, Keraton memegang kendali besar atas dinamika masyarakat. Selain sebagai pusat pemerintahan, Keraton juga menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama sampai kemudian diambil alih peranannya oleh pesantren setelah perpecahan yang terjadi di Keraton. Perpecahan yang terjadi menyebabkan kerajaan terbagi menjadi Kesultanan Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan, serta Kaprabonan atau Panembahan (Hariyanto, 2016).

Dari sekian banyak unsur yang berpengaruh pada dinamika masyarakat di Kota Cirebon, unsur politik dan agama sangat layak untuk dikemukakan. Politik dalam hal ini merupakan semacam media untuk memperoleh dan mengimplementasikan kekuasaan, sementara agama dalam hal ini menjadi penyeimbang dalam upaya memperoleh dan mengimplementasikan kekuasaan. Dalam hal politik ditinjau dari sisi historis, pada Pemilihan Umum tahun 1955, Masyumi dan Partai Nasional Indonesia (PNI) merupakan dua Partai Politik yang menduduki peringkat teratas dengan masing-masing meraih 1,8 juta suara dan 19,5 juta suara. Sementara itu, partai lain seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) menempati urutan ketiga dengan 739.000 suara dan Partai Nahdhatul Ulama (NU) menempati urutan keempat dengan perolehan 645.000 suara.

Secara umum, orientasi politik mendukung Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) cukup signifikan di Jawa Barat. Namun demikian, pada Kota Cirebon, PKI memperoleh suara terbanyak, yaitu 12.665 suara, disusul oleh PNI sebanyak 9.536 suara, Masyumi sebanyak 6.255 suara, dan NU sebanyak 5.838 suara. Berbeda dengan Kota Cirebon, suara hasil Pemilu 1955 di Kabupaten Cirebon dikuasai oleh Partai NU sebanyak 104.520 suara, disusul oleh PKI sebanyak 70.143 suara, PNI sebanyak 63.720 suara, dan Masyumi sebanyak 46.261 suara. Sementara itu, di Kabupaten Kuningan dan Majalengka, PNI menempati suara teratas yang diikuti oleh Masyumi, PKI dan NU. Di Kabupaten Indramayu, Masyumi menempati suara terbanyak. Dengan demikian, jika dipetakan Cirebon Raya memiliki perbedaan demografi politik antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Jumlah pesantren yang cukup banyak di Kabupaten Cirebon membuat daerah ini menjadi basis Partai NU pada Pemilu 1955. Sementara itu, Kota Cirebon merupakan basis kuat PKI, dan Kuningan serta Majalengka menjadi basis kuat bagi PNI. Khusus untuk Indramayu, wilayah ini menjadi basis kuat bagi Masyumi.

Dalam perpolitikan Kota Cirebon, mayoritas anggota DPRD merupakan partai-partai nasionalis, seperti Gerindra, PDIP, Nasdem, Demokrat, Golkar, PKS, PPP, dan PKB. Hal ini menunjukkan meskipun mayoritas warga Cirebon adalah Islam, tetapi masyarakatnya tergolong ke dalam “Islam nasionalis”. Dari 35 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, enam orang berasal dari Partai Gerindra, dan enam orang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Selain itu, Partai Demokrat dan Partai Nasdem diwakili oleh masing-masing empat orang. Sementara itu, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diwakili oleh masing-masing tiga orang. Untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) diwakili oleh masing-masing dua dan satu orang (BPS, 2021). Dengan begitu, mayoritas masyarakat dapat dikatakan sebagai warga NU dengan calon Kepala Daerah selalu berasal dari latar belakang NU. Dengan demikian, menurut Ketua

Pimpinan Cabang Nahdhatul Ulama Kota Cirebon, secara afiliasi politik keagamaan dapat dikatakan bahwa NU akan melawan NU sehingga siapapun yang memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan berasal dari tokoh yang memiliki latar belakang NU.

Fenomena politik dan agama di Cirebon adalah miniatur dari politik nasional. Meskipun masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya memiliki kultur budaya keraton dan Islam, sedikit sekali parpol Islam memiliki kursi di DPRD. Harus diakui bahwa perubahan telah terjadi sehingga masyarakat Islam lebih pragmatis memilih partai sesuai dengan perhitungan politik mereka. Selain itu, apa yang perlu dicatat adalah bahwa sebagian besar masyarakat Cirebon juga penganut Islam sinkretis atau abangan yang secara politik biasanya memberikan dukungannya kepada partai nasionalis. Mayoritas praktik kultural adalah mistis atau Islam abangan, sedangkan santri hanya ikut kiai saja. Perhitungan untuk memenangkan wali kota bukanlah hal yang sulit dilakukan. Untuk memenangkan pilkada, calon wali kota cukup menguasai 3 dari 5 kecamatan, dan anggaran yang digunakan dalam satu kecamatan dapat diperhitungkan, misalnya 1 miliar rupiah tiap kecamatan. Pada pilkada terakhir, Bamunas, pengusaha pemilik Grage Mall dan Grage Hotel serta Masjid Hijau, dikalahkan oleh Nasirudin Asis Umar, seorang pengacara dari Partai Demokrat yang menggandeng Etty Herawati dari Nasdem, yang menguasai kejaksaan. Sementara itu, di Kabupaten Kuningan, lembaga-lembaga politik dikuasai oleh PDIP dan kelompok sekuler. Bupati yang terkenal dari PDIP adalah Aang Hamid Sugandi. Ia terkenal membangun jalan ke pelosok-pelosok kampung, kemudian diteruskan oleh istrinya di periode ketiga. Sekarang, di periode keempat juga diteruskan oleh PDIP, yaitu Anang Kurnia. DPRD Kuningan dikuasai oleh PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, PKB dan PKS. Islam politik berpusat di Cilimus, Jalaksana, Kuningan dan Dharma (kecamatan).

Dalam setiap pemilihan umum baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota, pesantren selalu diperhitungkan secara politik. Kekuatan pesantren adalah pada jaringan alumninya, bukan pada jumlah siswanya sehingga bisa dijual dalam

*bargaining* politik. Hal yang terjadi adalah transaksi politik untuk menarik masa potensial. Oleh karena itu, apabila memenangkan kontestasi politik maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan digunakan untuk membayar kompensasi. APBD Cirebon besar dari jasa hotel dan restoran sebagai kota transit. Di samping itu, ada industri kerajinan rakyat yang ditopang oleh pusat produksi batik di Tegal Gubuk dan Trusmi.

Menurut keterangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Cirebon, konsep politik PCNU adalah mewujudkan politik yang *akhlakul kharimah* dengan santun, seperti menyatakan protes melalui jalur hukum dan tidak melakukan demonstrasi di jalanan. Politik yang *akhlakul kharimah* diakui akan menghapus kesenjangan dan mencapai kesejahteraan. Namun, dalam praktiknya, kontestasi antara PCNU dan kelompok-kelompok Islam terasa cukup keras di kota ini dalam bentuk saling membatalkan acara satu sama lain. Kontestasi elite PCNU dengan kelompok yang diklaim islamis tersebut berupa fenomena saling memprotes acara pengajian yang pembicaranya bertentangan dengan aliran keagamaan mereka. Misalnya, pada saat PCNU Kota Cirebon ingin mengundang K.H. Said Agil Siraj, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dalam acara haul Sayyidina Hasan dan Husin, terdapat laporan ke polisi bahwa K.H. Said Agil Siraj mendukung Syiah. Namun, setelah negosiasi akhirnya K.H. Said Agil Siraj tetap diizinkan memberikan ceramah di Cirebon. Sebaliknya, pada saat Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) mengundang Ustaz Bakhtiar Nasir ke Cirebon melalui Masjid At-Taqwa dalam acara pengajian, PCNU menolak dan melaporkan ke polisi. Selanjutnya, saat Yayasan Al-Bagja mengundang Ustaz Abdul Somad (UAS) dalam pengajiannya, PCNU kembali menolak. Yayasan dan pesantren tersebut dipimpin oleh Buya Yahya Zaenul Maarif dengan amaliahnya NU, tetapi harakat dan fikrahnya bukan NU. Pascanegosiasi, akhirnya UAS diizinkan mengisi pengajian yang terbatas dilaksanakan di tempat tertutup dengan alasan Covid-19.

Berpolitik dengan berlandas pada agama ini sudah menjadi tradisi yang diwariskan oleh para ulama sejak masa kolonial. Amak

Abkari (Rindanah, 2013) mencatat bahwa seorang Mufti Besar Kesultanan Kanoman, K.H. Muqoyyim atau dikenal dengan nama Mbah Muqoyyim, melakukan tindakan politik nonkooperatif terhadap Belanda. Tindakan seperti itu, terutama setelah berdirinya NU pada 1926, menjadi ciri dan karakter masyarakat Islam, seperti Cirebon, yang mengikuti secara taat kepemimpinan ulama. Ulama sebagai pemimpin informal telah menjadi panutan yang menjadi pembimbing masyarakat termasuk dalam berpolitik. Dengan demikian, masih kuatnya masyarakat Cirebon menggunakan politik Islam bisa dipahami karena sejauh ini warisan budaya kerajaan Islam yang ada di sana masih cukup berpengaruh. Meskipun demikian, dalam perkembangannya pada masa mutakhir ini perubahan telah terjadi di mana partai Islam tidak lagi menjadi pilihan karena politik agama atau berdasar pada agama ini telah meluntur setelah NU melakukan politik “Kembali ke Khitah”, yakni tidak lagi berpolitik praktis. NU yang menjadi wadah organisasi masyarakat Cirebon, khususnya kalangan pesantren, telah kembali menjadi organisasi social keagamaan pada tahun 1984.

Meskipun demikian, harus diakui bahwa sebagian tokoh Islam dan juga pesantren atau beberapa kiai-nya masih juga memegang politik Islam. Mereka tetap menyuarakan politik untuk kepentingan Islam atau memberikan dukungan kepada partai Islam yang ada. Pada sisi lain, pemerintah biasa mendatangi pesantren atau tokoh Islam untuk mendapatkan dukungan untuk legitimasinya. Pada masa pemilihan presiden pada tahun 2024 ini, misalnya, beberapa pesantren, termasuk Pesantren Buntet, setidaknya sebagian kiai-nya, ikut memberi dukungan terhadap calon presiden. Ini adalah sikap ambil bagian atau terlibat dalam politik praktis, yang seharusnya tidak lagi dilakukan, mengingat mereka adalah anggota NU.

Perlu dicatat bahwa masih terlibatnya sebagian pesantren dalam politik praktis adalah karena beberapa pertimbangan. Dalam pandangan Pesantren Buntet, politik praktis adalah strategi untuk menguasai sumber daya. Terdapat beberapa alasan mengenai pandangan tersebut. *Pertama*, menguasai politik berarti memiliki akses

terhadap kelompok yang berkuasa, sekaligus memiliki akses terhadap sumber daya termasuk kekuasaan dan ekonomi. *Kedua*, penguasaan sumber daya didasarkan atas siapa yang kuat dan siapa yang menang. *Ketiga*, sadar akan posisi pesantren sebagai *vote getter* dalam setiap pemilihan umum baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Semua calon dan parpol akan meminta restu ke pesantren. *Keempat*, cara berfikir yang harus dibangun dan dipraktikkan adalah tidak hanya parpol dan kandidat yang memanfaatkan pesantren, tetapi pesantren juga memanfaatkan politisi.

#### D. Penutup

Kota Cirebon yang telah berkembang sejak masa lalu dengan persinggungan Politik dan Agama menghadirkan dinamika pada masyarakat sipil menjadi heterogen, toleran, dan humanis dalam suatu *caruban* (campuran) yang menjadi asal kata Cirebon. Hal ini sejalan dengan konsep masyarakat sipil yang selanjutnya dikerucutkan menjadi *Civil Islam* yang menurut Hefner (2019) merujuk pada jenis atau varian keislaman yang memiliki karakteristik toleran, pluralis, sekuler, liberal, demokratis, inklusif, humanis, pro perubahan sosial, berprinsip pada kesetaraan gender, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban. Berkaitan dengan adab yang menjadi keadaban dan peradaban, mengacu pada konsep peradaban seorang pemikir Aljazair bernama Malik bin Nabi disebutkan bahwa suatu peradaban tidak akan bangkit, kecuali dengan akidah keagamaan. Dalam hal ini, nilai keadaban tersebut telah menjadi peradaban yang dikonsepsikan dan dibangun sejak masa awal Kerajaan Cirebon di bawah kepemimpinan Syarif Hidayatullah menggunakan landasan akidah keagamaan sehingga pada masa tersebut Cirebon mengalami masa kegemilangan.

Dalam perkembangannya, terutama pada masa kegemilangannya, muncul kelas menengah elite sebagai bagian dari masyarakat sipil di Kota Cirebon, yang mampu menjalankan roda pemerintahan sebagai birokrat sekaligus menjadi penyeimbang kekuasaan Keraton. Pendirian pesantren di wilayah sekitar Kota Cirebon dipelopori dan didominasi oleh masyarakat yang berasal dari kelas menengah dan

masih keturunan kerabat Keraton ini. Kini, kelas menengah di Kota Cirebon yang memiliki latar belakang pengusaha dan akademisi mampu memberikan warna baru dalam dinamika politik dan agama. Kelas menengah ini yang menjadi bagian dari elite penguasa sekaligus agen pendidik melalui lembaga pendidikan. Dalam lintasan sejarah, dinamika pasang surut hingga perpecahan merupakan suatu proses yang pasti terjadi di dalam masyarakat. Namun demikian, masyarakat sipil di Kota Cirebon tetap dapat mempertahankan unsur lokalitas dan kebudayaan yang mewarnai dinamika politik.

Upaya mempertahankan lokalitas dan kebudayaan tersebut setidaknya dilandasi oleh beberapa hal. *Pertama*, masyarakat di Kota Cirebon yang mayoritas beragama Islam mendukung pemisahan kekuasaan antara pejabat negara dengan masyarakat religius untuk menghindari adanya kepentingan terselubung. Hal ini dibuktikan dengan keinginan masyarakat yang kuat untuk memperdalam ilmu keagamaan, tetapi berupaya memisahkan kepentingan agama dengan politik sehingga politik bernuansa nasionalis religius lebih diminati oleh masyarakat sipil Islam di Kota Cirebon. *Kedua*, masyarakat sipil Islam di Kota Cirebon memberikan sanksi sosial tanpa pengecualian terhadap upaya mencampuri urusan terkait agama, negara, dan hak sipil, terutama pada hal-hal yang mendegradasikan nilai dan makna agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Ketiga*, masyarakat sipil Islam di Kota Cirebon yang sejak masa lalu telah mengalami proses modernitas menganggap demokrasi sebagai modernisasi dan instrumen peradaban untuk meminimalkan perbedaan sosial yang ada di dunia dengan berbagai macam latar belakang dan kepentingan.

Pada akhirnya, dapat diketahui bahwa ada beberapa ormas Islam yang dapat dikategorikan Islamis atau mendukung Islam politik di Kota Cirebon. Misalnya GAPAS, Al-Mannar, dan MMI di Kota Cirebon serta FPI di Kabupaten Kuningan. Namun, pada saat ini, terutama pascapilpres 2019, hampir semua ormas Islamis tidak kelihatan aktif. Hal tersebut diduga karena pada masa Presiden Jokowi, pemerintah tidak memberikan ruang gerak bagi mereka. Sementara itu, kebanyakan ormas Islam besar, seperti NU dan Muhammadiyah



dan juga beberapa pesantren Salafi tidak mendukung gerakan politik Islamisme. Kelompok ini lebih memilih memperkuat masyarakat sipil dengan pengajian, pendidikan, dan terlibat dalam politik. Secara historis, Kota Cirebon merupakan titik pertemuan antara kelompok-kelompok Islam kultural yang kebanyakan berkembang di Jawa Timur dan Tengah dan Islam formal yang lebih didominasi oleh etnis Sunda.

Temuan lapangan mengenai konsep berpolitik ormas Islam di Cirebon ini mendukung tesis Hefner bahwa masyarakat sipil Islam mendukung bekerjanya nilai-nilai dan sistem politik demokrasi. Selain itu, masyarakat sipil melalui pesantren menyediakan wahana sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan, dan moral untuk menjaga dan mengawasi keseimbangan Kota Cirebon. Keberagaman dalam masyarakat sipil pun dapat menjadi dasar yang penting bagi persaingan yang demokratis di Kota Cirebon meskipun hal ini masih perlu untuk dikaji lebih lanjut. Lebih dari itu, peran masyarakat sipil yang diwujudkan dalam bentuk pesantren dapat memperkaya peranan partai-partai politik dalam hal partisipasi politik, meningkatkan efektivitas politik dan meningkatkan kesadaran kewarganegaraan. Dalam hal ini, pesantren baik di wilayah Kota Cirebon maupun di wilayah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan berkontribusi dalam menjaga stabilitas politik di Kota Cirebon. Terakhir, pesantren atau komunitas agama yang ada di Kota Cirebon memiliki peran sebagai wadah bagi seleksi dan lahirnya para pemimpin politik yang baru yang mampu menghalangi dominasi rezim otoriter. Terkait hal ini, diperlukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan signifikansi pesantren dalam kaitannya dengan seleksi dan lahirnya para pemimpin politik yang baru yang mampu menghalangi dominasi politik. Dengan demikian, upaya menyibak dinamika politik Islam di Kota Cirebon melahirkan suatu gagasan berupa masyarakat sipil Islam mampu menguatkan proses demokratisasi selama dalam proses demokratisasi tersebut masyarakat tetap mengedepankan proses pemeliharaan kebebasan dan kebersamaan melalui musyawarah mufakat sesuai kaidah keagamaan.

## Daftar Referensi

- BPS Kota Cirebon. (2021). *Kota Cirebon dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik.
- Cohen, J. L., & Arato, A. (1992). *Civil society and political theory*. MIT Press.
- Diamond, L. (1994). Rethinking civil society: Toward democratic consolidation. *Journal of Democracy*, 5(3), 4–17.
- Ramage, D. E. (2002). *Percaturan politik di Indonesia: Demokrasi, Islam, dan ideologi toleransi* (Hadikusumo, Penerj.). Mata Bangsa.
- Erwantoro, H. (2012). Sejarah singkat Kerajaan Cirebon. *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 4(1), 166–179. <http://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v4i1.130>
- Firmanto, A. (2015). Historiografi Islam Cirebon (Kajian manuskrip sejarah Islam Cirebon). *Jurnal Lektur Keagamaan*, 13(1), 31–58. <https://doi.org/10.31291/jlk.v13i1.203>
- Gramsci, A. (1971). *Selection from the Prison Notebooks*. International Publishers.
- Hariyanto, O. I. B. (2016). Destinasi wisata budaya dan religi di Cirebon. *Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 4(2), 214–222. <https://doi.org/10.31294/jeco.v4i2.830>
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in indonesia*. Princeton University Press.
- Hefner, R. W., & Zaman, M. Q. (Ed.). (2007). *Schooling Islam: The culture and politics of modern education*. Princeton University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt7rqjj>
- Hefner, R. W. (Ed.). (2009). *Making modern muslims: The politics of Islamic education in Southeast Asia*. University of Hawaii Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt6wqvz8>
- Jamil, B. P. (2013). Perpecahan Kesultanan Cirebon. *Jurnal Kalijaga*, 33.
- Kuntowijoyo. (2006). *Islam sebagai ilmu: Epistemologi, metodologi, dan etika*. Tiara Wacana.
- Rindanah, R. (2013). Geneologi Pesantren Benda Kerep dan Pesantren Buntet Cirebon: Suatu perbandingan. *Holistik: Journal for Islamic Social Sciences*, 14(2), 209–230. <http://nui//dx.doi.org/10.24235/holistik.v14i2.449>

- Syatori, A. (2018). Tafsir dan ijihad politik pesantren: Suatu perspektif dari Pondok Buntet Pesantren Cirebon. *Jurnal YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, 4 (2), 350–383. <http://dx.doi.org/10.24235/jy.v4i2.3552>.
- Tocqueville, A. (1956). *Democracy in America*. Vintage Books.